

IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK
(Studi Kasus Peran Partai Golkar Dalam Memberikan Pendidikan Politik Terhadap Masyarakat Di Bener Meriah Tahun 2019-2020)

Rina Aris Tantya¹, Muhammad Bin Abubakar², Dahlan Arahman³, Zuhilmi⁴

^{1,2,3,4}*Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas*

Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh - Indonesia

E-mail Korespondensi : mabubakar@unimal.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan bagaimana peran partai partai dalam memberikan edukasi politik terhadap masyarakat. Pendidikan politik merupakan usaha dalam mentransformasikan hal-hal yang berkenaan dengan politik kepada pengurus, kader serta konstituen agar sadar terhadap peran, fungsi serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara sebagai teknik pengumpulan data utama, selain itu penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan studi pustaka dalam mendapatkan data-data yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan partai politik masih belum dijalankan secara optimal dalam melaksanakan perannya untuk memberikan edukasi politik terhadap masyarakat dikarenakan partai melakukan kegiatan tersebut disaat menjelang pemilu saja. Kemudian partai juga terlalu fokus pada kegiatan internal partai sehingga kontribusi partai terhadap kegiatan edukasi politik untuk masyarakat kurang maksimal serta partai juga mengakui bahwa selama ini peran partai lebih dioptimalkan untuk para kader saja dalam hal pendidikan politik. Partai juga mengalami kendala dan hambatan dalam melaksanakan edukasi politik terhadap masyarakat yaitu masyarakat masih terlalu fokus pada uang serta sembako untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh partai. Kemudian adanya sikap apatis dan skeptis masyarakat yang memandang bahwa partai politik datang kepada masyarakat hanya untuk memobilisasi masyarakat untuk mendapatkan dukungan masyarakat saat pemilu hendak berlangsung dan juga partai membutuhkan dana yang besar untuk melakukan suatu kegiatan bersama masyarakat, tetapi dikarenakan dana yang tidak mencukupi hal ini yang menjadi kendala bagi partai saat hendak melaksanakan suatu kegiatan bersama masyarakat.

Kata Kunci:

Peran, Partai Politik, Pendidikan Politik

A. PENDAHULUAN

Partai politik adalah suatu wadah organisasi yang bergerak dibidang politik yang mengamalkan ideologi tertentu dan dibentuk secara khusus. Partai politik mempunyai orientasi secara otoritas untuk meraih kekuasaan penuh dan disisi lain partai politik juga perlu meninjau dan mengontrol konstituen partai yang notabenehnya merupakan landasan besar terhadap suatu partai politik. Partai politik harus secara kontinu mewujudkan fungsi dan perannya sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang untuk mengabdikan diri kepada negara dan masyarakat sehingga kehadiran partai politik diharapkan dapat memberikan pencerahan terhadap kehidupan politik masyarakat. Peran partai politik sebagai pilar penyangga demokrasi layaknya seperti sebuah situasi kekuasaan tanpa adanya legitimasi.

Kinerja partai politik dalam mewujudkan fungsi dan perannya sebagai sarana pendidikan politik dapat kita lihat dari seberapa aktif partai politik melakukan kegiatan baik dengan kader partai maupun dengan masyarakat sehingga melahirkan partisipasi politik masyarakat yang tinggi serta adanya sosialisasi politik yang diberikan oleh partai politik kepada masyarakat yang diharapkan mampu mengubah masyarakat buta politik menjadi masyarakat melek politik. Apabila kapabilitas dan kinerja partai politik mampu dioptimalkan, tentunya hal ini akan berpengaruh impresif terhadap meningkatnya kualitas demokrasi dan juga kinerja suatu sistem politik.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik sebagaimana yang telah diatur pada Bab V tentang Tujuan dan Fungsi partai politik yakni, terdapat tiga tujuan khusus partai politik. Pertama, meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Kedua, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketiga, membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik Pasal 1 Ayat 4 yang berbunyi "Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara." Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-

IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK

JPP Volume 7, Nomor 1, 1-25, Januari-Juni 2022

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh pada Bab XI Bagian Kedua Pasal 78 Ayat 2 yaitu tujuan khusus partai politik lokal adalah pertama, meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kedua, memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh. Tujuan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut diwujudkan secara konstitusional. Dalam Pasal 79 dijelaskan bahwa partai politik lokal berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik rakyat serta partisipasi politik rakyat.

Sebagian masyarakat Kabupaten Bener Meriah memandang bahwa untuk berpartisipasi dalam pemilihan legislatif, masyarakat akan ikut serta apabila pihak yang akan maju dalam kontes pemilu memberikan bantuan baik berupa uang ataupun sembako kepada masyarakat. Hal ini terjadi lantaran sebagian masyarakat Kabupaten Bener Meriah yang notabenehnya merupakan masyarakat bermatapencarian tidak tetap berfikir bahwa mereka lebih membutuhkan cara yang instan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat yang ada di Kabupaten Bener Meriah masih menggunakan budaya politik Kaula yaitu masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju tetapi masih bersifat pasif. Mereka meyakini bahwa siapapun yang akan terpilih nantinya tidak akan membawa perubahan apapun.

Hal ini dapat kita kaji kembali bagaimana peran partai politik sebagai sarana edukasi politik dan sosialisasi politik kepada masyarakat membawa pengaruh perubahan pola fikir masyarakat yang lebih baik lagi. Partai politik seharusnya sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat agar seluruh masyarakat paham bahwa politik sangat penting bagi kehidupan bernegara dan juga melatih masyarakat agar tidak apatis terhadap politik dan menjadikan golput serta money politic sebagai suatu kebiasaan yang bisa saja menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat itu sendiri. Partai politik tidak hanya memberikan edukasi politik bagi masyarakat disaat menjelang pemilu saja tanpa adanya evaluasi, tetapi kegiatan ini masih harus berlangsung secara terus menerus sehingga menjadikan fungsi partai politik secara nyata dan berupaya untuk memperoleh dukungan masyarakat serta berusaha menunjukkan diri sebagai

pejuang kepentingan umum dan berusaha untuk memasyarakatkan ide, visi serta kebijakan strategis partai politik kepada konstituennya agar mendapatkan feedback berupa dukungan oleh masyarakat luas. Namun hal inilah yang membuat peran dan fungsi partai politik dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat dinilai belum dapat diimplementasikan dengan maksimal. Kader partai inilah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh tiap-tiap partai. Berdasarkan fenomena latar belakang di atas, maka mengkaji permasalahan peran partai dalam memberikan edukasi politik terhadap masyarakat penting dilakukan.

B. METODE KAJIAN

Terdapat unsur yang sangat penting dalam sebuah penelitian ilmiah yaitu berdasarkan pada fakta yang sebenarnya (valid) dan bukan khayalan maupun imajinasi serta menggunakan prinsip analisis yang kuat. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif analisis yaitu suatu pendekatan penelitian secara mendalam dengan fokus kepada suatu persoalan yang kemudian mengumpulkan dan menyusun data tersebut sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas dari masalah yang sedang dihadapi melalui proses penyampaian dengan uraian bahasa.

Menurut Tohirin, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya membangun pandangan orang yang diteliti secara rinci serta dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik (menyeluruh dan mendalam). Subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi atau data terkait dengan masalah yang akan dikaji atau diteliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: (1) Pengurus Partai Golkar (2) Masyarakat setempat. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti dengan melakukan wawancara yang merupakan proses tanya jawab langsung yang ditujukan terhadap informan di lokasi penelitian sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, dengan kata lain data diperoleh melalui studi kepustakaan yakni mengumpulkan data dari buku-buku referensi, jurnal yang sesuai dengan objek kajian peneliti.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi pustaka. Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sugiyono juga menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Selanjutnya untuk analisis data dilakukan melalui proses menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data penelitian ini adalah kualitatif. Setiap informasi yang diperoleh baik dari wawancara maupun yang lainnya akan dikumpulkan. Pada dasarnya, analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: (1) Reduksi kata, merupakan proses penyederhanaan data hasil penelitian yang dilakukan melalui proses seleksi, pengelompokan data sesuai dengan tujuan penelitian. (2) Paparan data, merupakan proses penampilan atau penyajian data secara lebih sederhana dalam bentuk penjelasan. (3) Penyimpulan, merupakan proses pengambilan intisari dari keseluruhan paparan atau penyajian data yang dideskripsikan untuk diformulasikan dalam bentuk kalimat yang singkat dan padat sebagai jawaban terhadap tujuan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada bab ini penulis ingin menggambarkan beberapa hal, diantaranya penulis akan menguraikan tentang lokasi penelitian dan memaparkan tentang komposisi Pemerintahan serta Partai Politik yang ada di Kabupaten Bener Meriah. Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di daerah Dataran Tinggi di Provinsi Aceh. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas 7 Kecamatan. Kabupaten Bener Meriah yang beribu kota di Simpang Tiga Redelong memiliki luas 1.941,61 km² terdiri dari

10 Kecamatan dan 233 desa. Penduduk terbesar di wilayah ini adalah suku Gayo, suku Aceh dan suku Jawa. Bahasa Gayo, bahasa Aceh dan bahasa Jawa dipakai oleh sebagian besar penduduk selain bahasa Indonesia. Jumlah penduduk Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019 sebanyak 148,18 ribu jiwa dengan rincian 75,11 ribu penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 73,06 ribu penduduk berjenis kelamin perempuan.

Secara geografis, kabupaten Bener Meriah terletak pada ketinggian rata-rata 100-2500 meter diatas permukaan laut. Kondisi bentang alam tersebut relative lebih melintang dari Timur ke Barat yang terletak antara 4°33'50"- 4°54'50" Lintang Utara dan 96° 40'75" – 97°17'50" Bujur Timur. Adapun batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Bener Meriah yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Timur. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bireun dan Aceh Tengah. Kabupaten Bener Meriah memiliki luas wilayah mencapai 190.401 Ha, terdiri dari 10 Kecamatan, 27 Mukim dan 233 Desa.

2. Pemerintahan dan Partai Politik di Bener Meriah

Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing sebagai unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan ditingkat Kabupaten. Untuk periode tahun 2017-2022, Bupati Bener Meriah dijabat oleh Ahmadi dan Wakil Bupati dijabat oleh Tgk. H. Sarkawi yang dilantik oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di Ruang sidang DPRK Bener Meriah pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017. Namun pada masa kepemimpinannya, Bupati Bener Meriah Ahmadi tersandung kasus penyuaipan terhadap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf terkait proyek-proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018 di Kabupaten Bener Meriah. Dalam kasus ini Ahmadi terbukti memberi suap secara bertahap kepada Gubernur Irwandi Yusuf berjumlah Rp1,05 Milyar. Ditengah-tengah permasalahan tersebut, Sarkawi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Bener Meriah telah menjabat lebih kurang sepuluh bulan sebagai pelaksana tugas menjalankan roda pemerintahan sepeninggalan Ahmadi dan resmi dilantik sebagai Bupati defentif

IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK

JPP Volume 7, Nomor 1, 1-25, Januari-Juni 2022

oleh Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di Ruang Sidang Dewan setempat pada hari Selasa tanggal 30 April 2019.

Secara umum dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah serta melaksanakan tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, penyelenggaraan, keistimewaan dan kekhususan serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya, dinas daerah melaksanakan beberapa fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sementara sebagai mitra kerja Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah, pemerintah bekerja sama dengan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten) Bener Meriah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten sebagai pelaksana tugas eksekutif sedangkan DPRK melaksanakan fungsi sebagai legislatif, beberapa fungsi DPRK diantaranya: (1) legislasi, yang diwujudkan dalam bentuk Qanun bersama Bupati. (2) penganggaran (budgetting), yang diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBK bersama pemerintah Kabupaten. (3) fungsi pengawasan, yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap Pelaksana Undang-Undang, Qanun, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Sedangkan beberapa tugas dan wewenang DPRK diantaranya adalah: membentuk Qanun Kabupaten yang dibahas dengan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama, melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan program pembangunan Kabupaten, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lain serta penanaman modal dan kerja sama internasional, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, memberitahukan kepada Bupati dan KIP Kabupaten mengenai akan berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati, memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati, memberi pnedapat, pertimbangan dan persetujuan kepada pemerintah Kabupaten terhadap rencana kerja sama internasional, mengusulkan pembentukkan KIP Kabupaten dan membentuk Panitia Pengawasan Pemilihan, melakukan pengawasan dan meminta

laporan kegiatan dan penggunaan Anggaran kepada KIP Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati, serta meminta laporan pertanggung jawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah untuk penilaian kinerja pemerintah.

3. Eksistensi Golkar dalam Melakukan Edukasi Politik

Reformasi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan melahirkan arus demokratisasi seperti kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berpolitik, termasuk kebebasan mendirikan partai politik, keterbukaan informasi, serta penegakkan supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Dilandasi oleh semangat reformasi tersebut, Golongan Karya melakukan perubahan paradigma serta menegaskan dirinya sebagai partai politik pada Rapat Pimpinan Nasional Golongan Karya pada tanggal 19 Oktober 1998 dan di deklarasikan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1999 dengan nama Partai Golongan Karya. Dengan perubahan tersebut, Partai Golongan Karya sepenuhnya mengemban hakikat partai politik sebagai pilar demokrasi dan kekuatan politik rakyat untuk memperjuangkan cita-cita dan aspirasinya secara mandiri, bebas dan demokratis.

Partai Golongan Karya di masa Orde Baru merupakan partai politik yang paling berjaya dan mampu bertahan selama lebih dari tiga dekade. Untuk menjadi partai politik yang besar, maka partai tersebut harus memikirkan bagaimana langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh partai agar menjadi partai yang dominan dan selalu eksis dalam sebuah negara. Salah satu langkah yang sangat penting yang harus dilakukan oleh partai politik adalah pelaksanaan edukasi politik dalam internal maupun eksternal partai. Edukasi politik adalah sebuah proses pengenalan partai yang terdiri dari visi misi dan platform partai untuk mencapai stabilitas dan nilai tertentu.

Partai Golkar merupakan kelanjutan Sekretariat Bersama Golongan Karya yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan berasaskan Pancasila. Partai Golkar bertujuan untuk mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD 1945 mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945, menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan

IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK

JPP Volume 7, Nomor 1, 1-25, Januari-Juni 2022

demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adapun yang menjadi tugas pokok Partai Golkar sebagaimana yang tertera dalam AD/ART Partai Golkar Pasal 8 yaitu memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum serta pertahanan dan keamanan nasional guna mewujudkan cita-cita nasional. Berkaitan dengan edukasi politik dalam pasal 9 Huruf d yaitu mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Muhammad Saleh selaku Kader DPD Tingkat-II Partai Golkar sekaligus Ketua DPR Kabupaten Bener Meriah dalam Wawancara menyebutkan bahwa;

“Harus diakui bahwa pendidikan politik itu sangat penting bagi masyarakat terlebih lagi masyarakat Bener Meriah. Sesungguhnya politik itu bukan sesuatu yang harus kita hindari tetapi harus dihadapi dan partai politik wajib mendorong kesadaran politik bagi masyarakat khususnya di Bener Meriah.”

Berdasarkan wawancara diatas, Muhammad Saleh menyebutkan bahwa pendidikan politik sangat penting bagi masyarakat khususnya masyarakat Bener Meriah. Politik bukan sesuatu yang harus dihindari tetapi harus dihadapi oleh setiap orang dan juga partai wajib mendorong kesadaran politik masyarakat khususnya masyarakat Bener Meriah. Lebih lanjut Muhammad Saleh menjelaskan bahwa;

“Proses politik itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat dan perlu dilakukan secara berkesinambungan. Dengan memahami politik, kita dapat memahami gejolak politik yang sedang terjadi dan juga kita dapat berpartisipasi aktif dalam proses politik.”

Berdasarkan wawancara diatas Muhammad Saleh menambahkan bahwa proses politik merupakan salah satu bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat dan perlu dilakukan secara berkesinambungan. Dengan memahami politik, setiap orang dapat memahami gejolak politik yang sedang terjadi dan juga dapat

berpartisipasi aktif dalam proses politik. Lebih lanjut Muhammad Saleh menjelaskan dalam wawancara bersama penulis bahwa;

“Peran kami selaku DPD Partai Golkar Kabupaten Bener Meriah juga melaksanakan kegiatan pengkaderan terhadap kader partai Golkar untuk membentuk kader partai yang profesional, yang pastinya mampu melaksanakan tugas dari organisasi ini demi terwujudnya tujuan AD/ART yang telah disusun. Dalam melakukan pengkaderan, partai Golkar melakukan pendidikan politik kader dengan tiga tingkatan yaitu pendidikan dan latihan kader tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat lanjut. Kami menyiapkan kader-kader partai yang pastinya telah disaring atas beberapa kriteria yaitu mental (ideologi), penghayatan terhadap visi misi dan platform partai serta prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, serta kepemimpinan. Hal ini menjadi bagian penting yang harus kita kembangkan dan kita bangun untuk mencapai keberhasilan baik dimasa sekarang maupun di tahun yang akan datang.”

Berdasarkan wawancara diatas, peran partai Golkar di Kabupaten Bener Meriah dalam edukasi politik terhadap kader partai yang dilakukan oleh partai Golkar melalui pengkaderan bertujuan untuk menghasilkan kader partai yang profesional serta mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan AD/ART partai dan menyiapkan kader-kader partai dengan beberapa kriteria diantaranya yaitu mental (ideologi), penghayatan terhadap visi misi dan platform partai, prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan kepemimpinan. Lebih lanjut dijelaskan oleh Muhammad Saleh

“Sebenarnya saya pun mengakui bahwa peran kami selaku partai memang tidak maksimal untuk masyarakat dalam hal pendidikan politik, karena memang kami melaksanakan kegiatan edukasi untuk masyarakat pun disaat pemilu hendak berlangsung. Kami lebih aktif berperan untuk kader partai saja seperti yang saya jelaskan tadi, tetapi partai juga berusaha mengoptimalkan perannya dalam memberikan edukasi politik untuk masyarakat yang dilakukan dengan cara mensosialisasikan pendidikan dasar ilmu politik kepada masyarakat karena kalau kita berbicara terlalu jauh takutnya menyimpang dari konteks yang dibahas dan juga kami selaku partai mewanti-wanti hal itu agar menghindari stigma negatif masyarakat.”

IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK

JPP Volume 7, Nomor 1, 1-25, Januari-Juni 2022

Berdasarkan wawancara diatas, Muhammad Saleh menjelaskan bahwa partai lebih aktif berperan dalam memberikan edukasi politik untuk para kader partai tetapi tidak memaksimalkan perannya dalam memberikan edukasi politik terhadap masyarakat serta dilakukan kegiatan tersebut hanya disaat menjelang pemilu akan berlangsung. Dalam kesempatan lain, penulis juga melakukan wawancara bersama Bapak Syarifuddin selaku kader partai Golkar lainnya. Beliau menjelaskan bahwa;

“Alhamdulillah selama ini kami dari partai Golkar pernah melakukan pendidikan politik untuk kader partai ditingkat kecamatan dan desa walaupun belum secara keseluruhan untuk desa-desa yang ada di Bener Meriah dan kami fokus untuk para pengurus kader inti. Kalau untuk masyarakat saya kira belum maksimal pelaksanaannya, karena itu menyangkut dana yang besar, tetapi kalau untuk simpatisan jika kami undang untuk menghadiri kegiatan yang kami lakukan di sekretariat menyangkut kegiatan edukasi politik, mereka akan hadir karena mereka tidak mengharapkan biaya dan kami juga mengakui bahwa pelaksanaan kegiatan bersama masyarakat hanya dimaksimalkan disaat menjelang pemilu saja.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak bahwa partai Golkar pernah melakukan kegiatan edukasi politik ditingkat kecamatan dan desa walaupun belum secara merata dan juga partai melakukan kegiatan edukasi politik kepada kader partai hanya difokuskan pada kader inti partai dan juga partai mengakui bahwa pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan masyarakat hanya dilakukan menjelang pemilu. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan edukasi politik untuk masyarakat belum maksimal pelaksanaannya dikarenakan membutuhkan biaya yang besar. Selanjutnya Syarifuddin menjelaskan bahwa;

“Kami sebagai partai besar di Bener Meriah tentunya sangat bertanggung jawab kepada masyarakat yang ada di Bener Meriah. Peran kami selaku partai dalam memberikan edukasi politik bagi masyarakat lebih kearah mensosialisasikan politik kepada seluruh tingkatan masyarakat walaupun pelaksanaannya tidak kontinu. Menurut saya partai memiliki tanggung jawab untuk membawa kondisi serta situasi masyarakat menjadi lebih baik

IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK

JPP Volume 7, Nomor 1, 1-25, Januari-Juni 2022

dengan mengedukasi masyarakat tentang politik, tetapi hal ini tidak akan dapat dilakukan apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran tentang itu. Ini juga menjadi masalah jika partai sendiri pun tidak melaksanakan perannya sebagai pendidik bagi masyarakat, intinya harus ada kerjasama antar partai dan masyarakat."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Syarifuddin menjelaskan bahwa peran partai Golkar dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat lebih kearah mensosialisasikan politik kepada seluruh tingkatan masyarakat walaupun pelaksanaannya tidak kontinu. Menurutnya, partai memiliki tanggung jawab untuk membawa kondisi serta situasi masyarakat menjadi lebih baik tetapi hal ini tidak akan dapat dilakukan apabila masyarakat sendiri tidak memiliki kesadaran tentang politik. Hal ini juga menjadi masalah jika partai tidak melaksanakan perannya sebagai pendidik bagi masyarakat dan diperlukan kerjasama antar partai dan masyarakat. Lebih lanjut Syarifuddin menjelaskan bahwa;

"Peran kami dalam melakukan kegiatan edukasi politik sebenarnya lebih spesifik untuk para kader partai saja, tentunya untuk lebih dapat meningkatkan kualitas para kader karena memang kami lebih fokus untuk para kader inti setelah itu dilanjutkan kepada kader yang lain, kalau untuk berperan lebih untuk masyarakat saya kira masih sangat kurang optimal peranannya tetapi kami tetap melakukan kegiatan tersebut bersama masyarakat walaupun pelaksanaannya hanya menjelang pemilu."

Berdasarkan penjelasan diatas, Syarifuddin menjelaskan bahwa partai lebih spesifik melakukan perannya dalam memberikan edukasi politik terhadap para kader inti yang kemudian dilanjutkan kepada para kader yang lain. Partai mengakui bahwa masih sangat minim peran yang diberikan oleh partai terhadap masyarakat dalam memberikan edukasi politik. Lebih lanjut Syarifuddin menjelaskan;

"Konsep partai Golkar dalam melakukan kegiatan edukasi politik baik di tingkat desa maupun kecamatan itu dilakukan dengan sistem pelatihan, workshop untuk selama ini itu yang kita lakukan, kita memberikan arahan-arahan dasar-dasar politik untuk masyarakat."

Berdasarkan keterangan diatas Syarifuddin menjelaskan bahwa konsep partai Golkar dalam melakukan kegiatan edukasi politik baik ditingkat desa maupun kecamatan yaitu dengan cara sistem pelatihan dan workshop dalam memberikan arahan-arahan politik bersama masyarakat. Lebih lanjut Syarifuddin menerangkan bahwa;

“Topiknya sejauh ini kita membahas tentang dasar-dasar ilmu politik, jika berbicara terlampau jauh pun sebenarnya itu bukan ranahnya karena ini menyangkut pendidikan politik untuk masyarakat bukan kampanye politik, kita hanya berbicara dasar-dasarnya saja kemudian fungsi-fungsi politik katakanlah kita berbicara bagaimana menghadapi pemilu, siapkah kita menghadapi pemilu, apa yang harus kita lakukan, itu kita akan bahas bersama masyarakat.”

Berdasarkan penjelasan Syarifuddin diatas, beliau menjelaskan bahwa topik yang dibahas dalam memberikan edukasi politik bagi masyarakat hanya membahas tentang dasar-dasar ilmu politik, karena jika berbicara terlampau jauh itu bukan ranahnya karena hal ini menyangkut tentang pendidikan politik bagi masyarakat bukan kampanye politik, partai hanya menjelaskan dasar-dasar politik serta fungsi-fungsi politik untuk masyarakat. Selanjutnya Syarifuddin menambahkan bahwa;

“Metode pendidikan politik yang dilakukan sistimnya orientasi, karena kalau berbicara lebih ditakutkan adanya pemikiran oleh sebagian masyarakat berfikir bahwa seolah-olah partai hanya menggiring masyarakat atau memobilisasi masyarakat yang memiliki kepentingan partai padahal niatnya sebenarnya bukan seperti itu, kita hanya sekedar untuk memberikan ilmu kepada masyarakat.”

Syarifuddin menjelaskan bahwa metode pendidikan politik yang dilakukan oleh partai hanya sistem orientasi karena jika berbicara terlalu jauh dikhawatirkan masyarakat berfikir bahwa seolah-olah partai hanya menggiring masyarakat atau memobilisasi masyarakat untuk kepentingan partai karena memang belum waktunya untuk berkampanye bersama masyarakat.

Tabel 1 Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Politik Oleh Partai Golkar di Bener Meriah

IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK
 JPP Volume 7, Nomor 1, 1-25, Januari-Juni 2022

Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Bentuk Kegiatan	Materi	Tujuan	Pemateri
14 Januari 2019	Kenawat Redelong	Pelatihan dan pembinaan Bagi masyarakat	Kesadaran Hak dan Tanggung Jawab Politik Masyarakat	Agar masyarakat memiliki kesadaran hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam proses berpolitik	Syarifuddin
15 Januari 2019	Pantan Tengah Jaya	Pelatihan dan pembinaan bagi masyarakat	Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara	Agar masyarakat lebih aktif lagi meningkatkan partisipasinya dalam hal kegiatan politik	Syarifuddin
25 Februari 2019	Jelobok	Pelatihan dan pembinaan bagi masyarakat	Pemahaman dan Tujuan Politik	Agar masyarakat memahami dan menghayati secara benar tujuan dari proses politik	Mhd Sale
27 Februari 2019	Simpang Teritit	Sosialisasi dan pembinaan Bagi masyarakat	Hak Politik Masyarakat	Memaksimalkan hak politik warga untuk berpartisipasi lebih lanjut terhadap politik	Darwinsyah
13 Maret 2019	Buntul Peteri	Sosialisasi dan pembinaan Bagi perempuan	Penguatan peran perempuan dalam meningkatkan Kapasitasnya Sebagai Agen Perubahan	Agar kaum perempuan lebih menyadari bahwa keberadaannya juga berpengaruh pada proses bernegara	Dra. Laila Wahyuni
13 Maret 2019	Tanjung Pura	Sosialisasi dan pembinaan bagi perempuan	Penguatan peran perempuan Dalam Meningkatkan Kapasitasnya Sebagai Agen Perubahan	Agar kaum perempuan lebih menyadari bahwa keberadaannya juga berpengaruh pada proses bernegara	Siti Anisah, S.S

Pendidikan politik memiliki tugas pokok untuk membangun kekuatan kontra untuk memberantas macam-macam distorsi dan situasi-situasi yang mengakibatkan

IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK

JPP Volume 7, Nomor 1, 1-25, Januari-Juni 2022

pertentangan juga persaingan. Setiap keberlangsungan segala bentuk kegiatan tidak dapat dipungkiri bahwasannya ada hal yang dapat menghambat langkah dalam mencapai tujuan kegiatan tersebut. Dalam menjalankan proses edukasi politik, Partai Golkar Bener Meriah juga mendapatkan kendala dan penghambat dalam prosesnya seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Saleh dalam wawancara sebagai berikut;

“Yang menjadi fokus partai dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat yaitu materi pendidikan yang diberikan yaitu meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam kehidupan bernegara dan konstitusi negara. Selanjutnya metode pendidikan yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada masyarakat luas pun ada yang secara langsung maupun tidak langsung, contohnya kita menggunakan media massa seperti Facebook, karena jaman semakin canggih jadi kita juga memanfaatkan teknologi yang ada walaupun tidak optimal penyampaiannya.”

Berdasarkan hasil wawancara, Muhammad Saleh menyebutkan bahwa yang menjadi fokus partai dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat yaitu materi pendidikan yang diberikan meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam kehidupan bernegara dan konstitusi negara. Partai Golkar juga memanfaatkan teknologi media massa seperti Facebook dalam penyampaian materi edukasi politik bagi masyarakat luas. Penulis juga bertanya dalam kesempatan lain bersama informan mengenai kendala dan penghambat partai dalam memberikan edukasi politik terhadap masyarakat di Kabupaten Bener Meriah. Muhammad Saleh mengungkapkan bahwa;

“Terlalu banyak kendala yang kami hadapi saat melakukan kegiatan edukasi politik bersama masyarakat. Salah satunya masyarakat kita terlalu fokus ke uang, apalagi di zaman sekarang banyak orang berasumsi tidak ada yang gratis. Bukan tanpa sebab mereka berargumen seperti itu, bisa kita lihat bagaimana kondisi perekonomian masyarakat di Bener Meriah ini, semua bertumpu pada hasil kebun mereka. Pasang surut keberhasilan kebun mereka juga berubah-ubah, tidak melulu mengalami keberhasilan, bisa saja saat kegiatan berlangsung kondisi tanaman mereka tidak berhasil,

maka dari itu mereka terfokus ke uang ataupun sembako saat kegiatan yang dibuat oleh partai berlangsung sebagai ganti rugi ketidakberhasilan tanaman mereka."

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kendala yang dihadapi oleh partai Golkar ialah terfokusnya masyarakat terhadap uang atau sembako saat kegiatan yang partai lakukan berlangsung dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Bener Meriah hampir rata-rata bertumpu pada hasil kebun mereka yang selalu berubah-ubah. Lebih lanjut Muhammad Saleh menjelaskan;

"Faktor penghambat yang lain ialah sebagian masyarakat kurang merespon kegiatan yang kami lakukan sehingga sulit untuk melakukan pendekatan kepada seluruh masyarakat, apalagi masyarakat Bener Meriah ini belum sepenuhnya memahami arti politik secara keseluruhan. Ditambah lagi masyarakat memiliki pandangan buruk terhadap partai dan tidak jarang dari mereka mengatakan partai dekat dengan masyarakat karna ada maunya saja. Sejujurnya, kami selaku partai tetap berusaha melakukan pendekatan kepada masyarakat baik itu di daerah terjangkau maupun di daerah pelosok yang kiranya sangat membutuhkan sentuhan partai maupun pemerintahan. Kami juga menekankan kepada pengurus partai Golkar di Bener Meriah ini untuk tetap merakyat dan berusaha mendekati diri kepada masyarakat serta mengubah citra buruk partai agar mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat. Walaupun kegiatan ini tidak berjalan maksimal, tetapi ini juga merupakan PR berat bagi kami selaku partai politik."

Berdasarkan penjelasan informan, dapat disimpulkan bahwa partai Golkar juga mengalami kendala dan hambatan dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat di Bener Meriah. Pandangan buruk masyarakat terhadap partai politik tidak membuat partai Golkar menyerah begitu saja dalam mendekati diri kepada masyarakat bahkan partai juga menyebutkan kendala dan hambatan ini merupakan PR berat bagi partai Golkar di Kabupaten Bener Meriah. Sebelum menutup wawancara, Muhammad Saleh juga menambahkan bahwa;

"Walaupun peran kami belum maksimal dalam menjalankan proses edukasi politik kepada masyarakat, bisa dikatakan bahwa tingkat

IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK

JPP Volume 7, Nomor 1, 1-25, Januari-Juni 2022

keberhasilannya hanya 40%, tetapi kami telah berusaha dan berupaya dalam menjalankan tugas ini sesuai dengan Undang-Undang dan AD/ART yang telah diatur sedemikian rupa. Kami juga berterima kasih kepada masyarakat Bener Meriah yang telah mendukung partai kami untuk terus maju walaupun masih banyak hal yang belum bisa kami optimalkan."

Muhammad Saleh menjelaskan bahwa, walaupun tingkat keberhasilan peran partai Golkar dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat hanya 60%, tetapi partai Golkar sudah mengupayakan yang terbaik dalam menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang dan AD/ART yang telah ditetapkan. Diakhir wawancara Muhammad Saleh menjelaskan bahwa;

"Tentunya dalam hal ini persaingan antar partai dalam menarik simpati masyarakat untuk menjadi partai pemenang pastinya ada. Tetapi kami terus berusaha menonjolkan citra positif partai dan menunjukkan kader-kader terbaik kami yang pastinya kompeten, walaupun melihat perilaku masyarakat yang terlalu berfokus dengan uang, secara perlahan kita sadarkan dengan edukasi politik ini, intinya kita semua sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik."

Berdasarkan wawancara akhir bersama Muhammad Saleh selaku Kader DPD Partai Golkar menjelaskan bahwa walaupun persaingan antar partai itu ada, tetapi partai Golkar tetap berusaha menonjolkan sisi positif partai dengan cara menunjukkan kader-kader terbaik partai yang kompeten serta secara perlahan menyadarkan masyarakat Bener Meriah dengan edukasi politik yang bermanfaat. Penulis juga melakukan wawancara dalam kesempatan lain bersama informal lainnya, hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Syarifuddin selaku kader partai Golkar dalam wawancara bersama penulis, beliau menjelaskan bahwa;

"Kendala dan penghambat partai dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yaitu masih sedikit respon masyarakat terhadap setiap kegiatan yang partai lakukan, terlebih lagi pandangan masyarakat yang menganggap bahwa masyarakat hanya dijadikan alat untuk memobilisasi suara dan dukungan untuk partai dan juga masyarakat tidak mau

IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK

JPP Volume 7, Nomor 1, 1-25, Januari-Juni 2022

berpartisipasi dalam kegiatan jika tidak diberikan cendera mata seperti uang ataupun sembako."

Syarifuddin menjelaskan bahwa kendala dan penghambat partai dalam memberikan edukasi politik bagi masyarakat yaitu masih rendahnya respon masyarakat terhadap setiap kegiatan yang partai lakukan terlebih lagi masyarakat memiliki pandangan bahwa masyarakat hanya dijadikan alat untuk memobilisasi suara dan dukungan terhadap partai serta masyarakat tidak mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan jika tidak diberikan cendera mata seperti uang ataupun sembako. Lebih lanjut Syarifuddin menjelaskan bahwa;

"Kendala lainnya saya kira untuk melaksanakan suatu kegiatan pastinya memerlukan dana yang besar terlebih lagi kita melihat dari perilaku masyarakat, sementara kegiatan partai tidak hanya satu tetapi masih banyak kegiatan yang lainnya, maka dari itu partai kurang optimal dalam melakukan kegiatan pendidikan politik untuk masyarakat."

Syarifuddin menyebutkan kendala lain yang dihadapi partai yaitu untuk melaksanakan suatu kegiatan tentunya membutuhkan dana yang besar sementara partai memiliki kegiatan yang lainnya yang belum dilaksanakan, maka dari itu partai kurang optimal dalam melakukan suatu kegiatan edukasi politik bagi masyarakat. Selanjutnya Syarifuddin menyebutkan bahwa;

"Untuk saat ini program pendidikan politik yang sudah terlaksana yaitu pendidikan politik ditingkat kecamatan dan desa untuk program yang belum terlaksana kami memang menargetkan di tahun 2021 ini untuk memberikan edukasi politik bagi pemilih pemula".

Syarifuddin menjelaskan bahwa program pendidikan politik yang sudah terealisasi yaitu pendidikan politik baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat desa. Adapun program yang belum terlaksana yaitu partai tengah menargetkan ditahun 2021 ini untuk memberikan edukasi politik bagi pemilih pemula dalam menghadapi pemilu yang akan datang. Syarifuddin menjelaskan dalam wawancara terakhir bersama penulis yaitu;

“Untuk indikator keberhasilan partai dalam memberikan edukasi politik bagi masyarakat kami merasa yang kami lakukan selama ini belum berhasil karena memang belum mencakup secara keseluruhan dan belum merata serta juga saya akui partai memang fokus pada tingkat kepengurusan partai Golkar saja, tetapi kami sudah menjalankan karena juga tanggung jawab partai dalam hal itu walaupun pelaksanaannya belum optimal.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Syarifuddin menjelaskan bahwa indikator keberhasilan partai dalam memberikan edukasi politik bagi masyarakat masih belum berhasil dikarenakan belum mencakup secara keseluruhan kegiatan yang partai lakukan serta partai hanya fokus pada tingkat kepengurusan partai saja walaupun pelaksanaannya belum optimal akan tetapi partai sudah menjalankannya karena memang sudah tanggung jawab partai dalam memberikan pendidikan politik bagi kader dan masyarakat.

4. Pendidikan Politik Masih Menjadi Formalitas

Partai politik merupakan salah satu elemen penting dalam sistem politik di suatu negara, terlebih lagi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam melaksanakan pendidikan politik baik kepada kader partai maupun masyarakat. Kehadiran partai politik tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, oleh karena itu yang menjadi fokus utama dalam persaingan politik adalah masyarakat itu sendiri dikarenakan masyarakatlah yang menentukan siapa yang akan menjadi pemenang dalam kontes persaingan tersebut.

Tingginya tingkat kepuasan masyarakat sangat membantu untuk meningkatkan reputasi dan citra partai politik dalam jangka panjang. Dengan baiknya reputasi, suatu partai politik memiliki kemudahan untuk membuat masyarakat rela memberikan suara mereka kepada partai politik itu sendiri. Tetapi disisi lain, partai politik juga perlu memperhatikan dimensi lain dari pemilih, yaitu kekecewaan masyarakat. Ketika partai politik memberikan harapan bahwa program kerja mereka akan dapat mengentaskan permasalahan masyarakat, namun kenyataannya tidak mencerminkan seperti janji awal.

Seperti halnya pandangan masyarakat terhadap peran partai politik dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat di Bener Meriah masih bersifat formalitas. Berdasarkan dari hasil wawancara oleh beberapa masyarakat yang ada,

terlihat sebagian masyarakat menjelaskan bahwa mereka pernah mengikuti kegiatan yang partai lakukan terkait pendidikan politik bersama masyarakat, masyarakat juga berpendapat bahwa memang sangat jarang sekali partai politik melakukan suatu kegiatan terkait pendidikan politik bagi masyarakat. Disamping itu, masyarakat juga menilai bahwa untuk apa partai politik mengedukasi masyarakat terkait pendidikan politik tetapi pada kenyataannya partai sendirilah yang tidak mengindahkan ajaran tersebut. Masyarakat juga berpendapat bahwa seharusnya partai harus bisa membedakan mana kegiatan pendidikan politik bersama masyarakat dan juga mana kegiatan kampanye bersama masyarakat untuk mencari dukungan, kedua hal itu seharusnya dapat dibedakan oleh partai dikarenakan pada saat kampanye berlangsung partai sering kali mengatasnamakan masyarakat untuk memberikan pendidikan politik tetapi pada kenyataannya masyarakat hanya disuruh untuk mendukung sebuah partai tersebut.

Masyarakat juga berpendapat bahwa setelah mengikuti kegiatan yang partai lakukan, hanya sedikit materi yang dapat dimengerti oleh beberapa masyarakat karena masyarakat menilai bahwa terdapat perbedaan teori yang diberikan oleh partai untuk masyarakat dan praktek yang dilakukan oleh partai terhadap masyarakat. Terkait hal itu masyarakat juga kehilangan ketertarikan dalam mengikuti kegiatan yang partai lakukan karena teori yang disampaikan jauh berbeda pada prakteknya. Padahal kehadiran partai politik dalam sistem demokrasi tidak terlepas dari suatu peran dan fungsinya untuk membentuk masyarakat agar memahami politik serta memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi dan juga sebagai usaha sadar untuk memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik. Tentunya hal ini mempunyai keterkaitan bagi partai politik sendiri, yaitu bagaimana suatu partai politik berperan dalam membentuk kesadaran politik masyarakat serta partisipasi politik masyarakat.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Kabupaten Bener Meriah, penulis menemukan bahwa peran partai politik masih belum optimal dalam melakukan perannya dalam memberikan edukasi politik terhadap masyarakat luas. *Pertama*, partai mengakui bahwa peran ini belum sepenuhnya berjalan dengan optimal dikarenakan partai hanya melakukan edukasi politik disaat menjelang pemilu saja atau bisa dikatakan saat kampanye saja. Padahal menurut analisis penulis, partai harus membedakan secara transparan

IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK

JPP Volume 7, Nomor 1, 1-25, Januari-Juni 2022

bahwa kampanye politik dan edukasi politik itu berbeda. Menurut penulis, kampanye merupakan sebuah strategi dari partai politik untuk memobilisasi masyarakat luas agar memilih partai tersebut, sedangkan edukasi politik, partai harus benar-benar memosisikan diri sebagai pendidik bagi masyarakat luas sehingga masyarakat sadar terhadap kewajibannya sebagai warga negara.

Kedua, partai terlalu fokus kepada peran internal partai namun tidak terlihat kontribusinya kepada masyarakat. Hal ini yang membuat peran partai menjadi tidak optimal pelaksanaannya dalam proses edukasi politik terhadap masyarakat. Ketiga, partai menilai pendidikan politik itu sangat penting bagi masyarakat, tetapi disisi lain hampir seluruh masyarakat Kabupaten Bener Meriah tidak memahami dengan betul apa itu politik. Hal ini diakui oleh partai tetapi partai juga tidak mengoptimalkan perannya dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.

Merujuk problem di atas, ada beberapa kendala dan hambatan dalam melakukan perannya untuk memberikan edukasi politik terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Bener Meriah yaitu, Pertama, masyarakat terlalu fokus pada uang ataupun sembako untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh partai dan juga masyarakat kurang merespon kegiatan yang partai politik lakukan sehingga sulit untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat, ditambah lagi masyarakat memiliki pandangan buruk terhadap partai politik. Kedua, adanya sikap apatis dan skeptis masyarakat dan memandang bahwa partai politik datang kepada masyarakat hanya untuk memobilisasi masyarakat untuk mendapatkan dukungan masyarakat saat pemilu berlangsung. Pandangan mengenai buruknya politik tentunya berdampak kepada sebuah partai politik yang menjadikan terhambatnya kedekatan partai politik dengan masyarakat.

Ketiga, partai mengakui bahwa untuk melakukan suatu kegiatan pastinya memerlukan dana yang cukup besar, hal ini yang menjadi kendala bagi partai dalam melaksanakan suatu kegiatan sementara masih banyak lagi kegiatan partai yang belum berjalan. Kendala dan penghambat tersebut tentunya dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu partai dalam melakukan edukasi politik kepada masyarakat yang dinilai pelaksanaannya belum optimal. Adanya persaingan antar partai juga mempengaruhi suatu partai untuk dapat berkembang dan menunjukkan eksistensi sebuah partai dalam menghadapi suatu kompetisi.

IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK

JPP Volume 7, Nomor 1, 1-25, Januari-Juni 2022

Penulis menganalisis bahwa kurangnya aktivitas partai dalam proses edukasi politik bersama masyarakat yang membuat masyarakat Kabupaten Bener Meriah masih minim akan pengetahuan politik dan sebagian masyarakat juga masih berpatokan dengan uang. Partai juga kurang mendominasi perannya dalam hal pendidikan politik bagi masyarakat terlebih lagi penulis melihat bahwa Kabupaten Bener Meriah termasuk daerah yang padat penduduknya, tetapi masih ditemukannya masyarakat yang sama sekali tidak paham atau hanya sekedarnya saja paham tentang politik. Partai juga dianggap terlalu banyak kepentingan dan konflik sehingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Menurut penulis, kurangnya edukasi politik yang dilakukan oleh partai dapat membuat masyarakat menjadi pasif yang pastinya dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Setiap partai menganggap bahwa edukasi politik itu sangat penting dilakukan tetapi partai juga tidak melakukan fungsinya secara maksimal dalam hal ini. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap suatu partai juga merupakan keberhasilan partai dalam merebut hati masyarakat. Partai yang aktif menjalankan kegiatan internal partai diharapkan mampu menyebarluaskan ideologi dan nilai-nilai perjuangan partai kepada masyarakat.

Secara konseptual, jelas tertulis bahwa sudah menjadi kewajiban bagi partai politik untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat tidak hanya sekedar untuk mencari suara dan dukungan masyarakat tetapi juga meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan membangun etika serta budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi pada kenyataannya penulis menilai bahwa partai memang sengaja hanya ingin mencari suara masyarakat dengan cara melakukan suatu kegiatan pendidikan politik untuk masyarakat tetapi disamping itu pesan yang disampaikan oleh partai hanya untuk menggiring suara masyarakat untuk memilih partai tersebut serta masih ditemukan beberapa perilaku masyarakat yaitu memfokuskan uang ataupun sembako pada setiap kegiatan baik saat kegiatan pendidikan politik maupun ketika pemilu hendak berlangsung. Hal ini terlihat bahwa partai masih gagal dalam menjalankan fungsi dan tujuannya dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Bener Meriah dan partai hanya menikmati suara yang diberikan oleh masyarakat.

IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK

JPP Volume 7, Nomor 1, 1-25, Januari-Juni 2022

Jika dikaitkan dengan teori Kartini Kartono, terdapat beberapa hal yang membuat pendidikan politik memiliki hambatan untuk dilaksanakan baik untuk masyarakat dan juga kader partai yang meliputi :

1. Apatisme dan sinisme politik, sikap putus asa mengakibatkan masyarakat sulit untuk mempercayai usaha edukatif dan gerakan-gerakan politik karena masyarakat menganggap bahwa semua yang dilakukan adalah kebohongan semata.
2. Latar belakang pendidikan rendah membuat masyarakat sulit memahami situasi politik.
3. Penguasa otoriter, partisipasi dan pengawasan terhadap pemerintah tidak dikehendaki oleh mereka para elit.
4. Sulitnya menyadarkan masyarakat tentang kondisi diri sendiri yang diliputi kesengsaraan dan kemiskinan karena terlalu lama hidup dengan keadaan tertindas.

D. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa adapun peran partai Golkar dalam memberikan edukasi politik terhadap masyarakat di Bener Meriah yaitu masih kurang optimal pelaksanaannya dikarenakan partai hanya melakukan kegiatan tersebut disaat menjelang pemilu, partai juga terlalu fokus kepada perannya dalam internal partai namun tidak terlihat kontribusinya kepada masyarakat, partai menilai pendidikan politik sangat penting bagi masyarakat akan tetapi partai tidak mengoptimalkan perannya dalam melakukan edukasi politik terhadap masyarakat. Adapun yang menjadi kendala dan hambatan partai Golkar dalam memberikan edukasi politik yaitu masyarakat masih terlalu fokus pada uang dan sembako untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh partai serta kurang merespon kegiatan yang partai politik lakukan, adanya sikap apatis dan skeptis masyarakat yang memandang bahwa partai politik datang kepada masyarakat hanya untuk memobilisasi masyarakat untuk mendapatkan dukungan masyarakat saat pemilu berlangsung dan juga partai memerlukan dana yang besar untuk melakukan setiap kegiatan sementara masih banyak lagi kegiatan partai yang belum dilaksanakan.

IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK

JPP Volume 7, Nomor 1, 1-25, Januari-Juni 2022

Daftar Pustaka

Buku

- Budiardjo Miriam, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Darmawan Ikhsan, 2015, *Mengenal Ilmu Politik*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Fadjar Abdul Mukthie, 2013, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Firmanzah, 2011, *Mengelola Partai Politik (Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kartono Kartini, 2009, *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa*, Bandung: Mandar Maju.
- Kuswanto, 2016, *Pengantar Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial*, Malang: Setara Press.
- Labolo Muhadam, 2014, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Teori, Konsep dan Isu Strategis)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mufti Muslim, 2012, *Teori-Teori Politik*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sirozi. M, 2005, *Politik Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahman. A, 2007, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Partai Politik dan Perubahannya, 2011, *Gradien Mediatama*.
- #### Skripsi
- Irmawati Devi, 2015, *Peran Partai Politik Sebagai Agen Pendidikan Politik Masyarakat (Studi Kasus Partai Politik Nasional Di Aceh Utara)*, Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh.
- Sandika Afen, 2018, *Peran PDI Perjuangan Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Menjelang Pilkada Mesuji Tahun 2017*, Lampung: Universitas Raden Intan.
- Ashar Ahmad Syaiful, 2011, *Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang*, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Saputra Eri, 2014, *Peran Partai Gerakan Indonesia Raya Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Di Kota Banda Aceh*, Darussalam Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK

JPP Volume 7, Nomor 1, 1-25, Januari-Juni 2022

Nasrullah Walid, 2015, Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Lokal Dan Partai Politik Nasional Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, Darussalam Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

Jurnal

Elisabeth Sitepu. 2016. Peranan Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Yang Berkarakter Terhadap Masyarakat. Jurnal Ilmiah Research Sains. Vol. 2. No. 1. ISSN: 2443-0269. Universitas Darma Agung. Medan.

Karim A Abdul. 2015. Teori dan Konsep dalam Konteks Pendidikan Politik. Modul. M. Iwan Satriawan, Mustafa Lutfi. 2015. Risalah Hukum Dan Teori Partai Politik. Jurnal Fakultas Hukum: Universitas Lampung. Lampung.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

.